

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan SIPD merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah pusat dengan beberapa proses yaitu mulai penerbitan surat keputusan Kemendagri, tahap sosialisai dari kementrian, tahap koordinasi internal Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabuoaten TTU, dan sosialisasi antar pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten TTU. Kemudian terdapat 5 proses implementasi SIPD yaitu persiapan, pengembangan sistem, pelatihan dan sosialisasi, implementasi dan uji coba, evaluasi dan pemeliharaan. Meskipun regulasi SIPD telah ditetapkan sejak tahun 2020, implementasi secara aktif di BKAD Kabupaten TTU baru berjalan pada tahun 2023. Proses peralihan dari sistem sebelumnya (SIMDA dan EFMIS) ke SIPD tidak berlangsung secara mulus dan memerlukan penyesuaian bertahap dari sisi teknis maupun organisasi.
2. Penerapan aplikasi SIPD di BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan pemahaman dan kemampuan teknis sebagian pegawai dalam

mengoperasikan SIPD, terutama pada proses penginputan data yang rinci dan harus mengikuti alur sistem. Selain itu, gangguan teknis seperti sistem yang lambat serta keterbatasan sarana pendukung berupa jaringan internet dan perangkat kerja turut menghambat kelancaran pekerjaan. Di sisi lain, karena SIPD bersifat terintegrasi, keterlambatan atau kesalahan input pada satu bidang dapat berdampak pada bidang lain, sehingga koordinasi antarbidang menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan penggunaan SIPD.

3. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di BKAD Kabupaten Timor Tengah Utara secara umum sudah berjalan cukup efektif. SIPD mampu mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah sehingga alur kerja menjadi lebih tertib, sistematis, dan efisien. Penggunaan sistem ini juga membantu meningkatkan ketertiban dan akurasi data, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Namun demikian, efektivitas penggunaan SIPD masih dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, seperti kemampuan sumber daya manusia, stabilitas sistem, ketersediaan jaringan internet, serta koordinasi antarbidang. Apabila faktor-faktor tersebut dapat ditingkatkan dan dikelola dengan baik, maka pemanfaatan SIPD akan semakin optimal dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

6.2.1 Saran Praktis

1. Pemerintah daerah memperkuat peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan dan pendampingan internal, agar aparatur semakin mampu mengoperasikan SIPD secara optimal pada seluruh modul yang digunakan.
2. BKAD Kabupaten TTU menetapkan dan menerapkan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan data dalam SIPD untuk meningkatkan kualitas data serta meminimalkan kesalahan input dan ketidaksesuaian informasi.
3. Koordinasi internal BKAD dan koordinasi dengan OPD pengguna SIPD perlu terus ditingkatkan, mengingat SIPD bersifat terintegrasi dan sangat bergantung pada konsistensi data lintas perangkat daerah.
4. Evaluasi dan pemeliharaan sistem SIPD perlu dilakukan secara berkala dan terencana agar kendala teknis maupun administratif dapat diantisipasi lebih dini dan tidak mengganggu proses pengelolaan keuangan daerah.
5. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya jaringan dan perangkat kerja, agar pemanfaatan SIPD dapat berjalan lebih stabil dan efektif.

6.2.2 Saran Akademik

1. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi SIPD dengan menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan atau tata kelola pemerintahan untuk memperkuat kontribusi teoretis dalam kajian administrasi publik.
2. Peneliti berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya dengan melibatkan lebih banyak OPD atau melakukan studi perbandingan antar daerah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi SIPD.
3. Penelitian di masa mendatang juga dapat diarahkan pada analisis dampak penggunaan SIPD terhadap kualitas laporan keuangan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.